

Dinamika Pemerintahan Soppeng Pada Masa Afdeling Bone Hingga Masa Pemerintahan Andi Wana 1905-1960

Dodi Doigo Rahmada¹, Patahuddin²

Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial UNM

Email: lpdodot@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika dan sejarah pemerintahan Soppeng dari masa Afdeling Bone hingga Pemerintahan Daerah Tingkat II Soppeng sejak tahun 1905 sampai tahun 1960 dan dampak kebijakan Andi Wana selaku Kepala Daerah pertama Pemerintahan Daerah Tingkat II Soppeng. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah, yaitu heuristik (mencari dan mengumpulkan sumber), kritik sumber (kritik ekstern dan kritik intern), interpretasi (penafsiran sumber) dan historiografi (penulisan sejarah). Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan penelitian pustaka, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Soppeng merupakan salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang pernah menggunakan beragam sistem pemerintahan, mulai dari sistem pemerintahan Tomanurung, kerajaan, Hindia Belanda, Jepang, Negara Indonesia Timur, hingga pemerintahan NKRI. Penulis mengkhususkan pengkajian, penelitian dan penulisan pada dinamika sistem pemerintahan masa hindia belanda, jepang, negara indonesia timur, hingga pembentukan daerah tingkat II yang di pimpin oleh Andi Wana, dari hasil penafsiran penulis menganggap bahwa secara umum sistem yang di gunakan saat ini tidak lain merupakan warisan dari negara penjajah yang pernah mendiami indonesia. Yang berbeda hanyalah pada wilayah administrasi dimana sistem dan kebijakan yang di gunakan sekarang berdasarkan kebutuhan yang diinginkan oleh penguasa. Akhir dari penelitian ini menunjukkan bahwa Soppeng memiliki rentetan sejarah yang panjang terkait dinamika pemerintahan. Namun hasil dari sistem pemerintahan yang pernah diterapkan, pada akhirnya menjadi pintu awal dalam media perlawanan, memobilisasi massa dalam melawan penjajah serta memajukan dan membangun daerah.

Kata kunci: Pemerintaha, Soppeng, Afdeling Bene dan Pemerintahan Andi Wana

Abstract

This study aims to determine the dynamics and history of the Soppeng government from the Afdeling Bone period to the Soppeng Level II Regional Government from 1905 to 1960 and the impact of Andi Wana's policy as the first Regional Head of the Soppeng Level II Regional Government. This research uses historical research methods, namely heuristics (searching and gathering sources), source criticism (external criticism and internal criticism), interpretation (interpretation of sources) and historiography (writing history). The method of data collection is done by doing library research and documentation. The results showed that Soppeng was one of the regions in South Sulawesi that had used a variety of government systems, ranging from the Tomanurung government system, the kingdom, the Dutch East Indies, Japan, the State of East Indonesia, to the Republic of Indonesia government. The author specializes in study, research and writing on the dynamics of the Dutch Indian government system, Japan, eastern Indonesia, until the formation of the second level led by Andi Wana, from the interpretation of the authors assume that in general the system in use today is nothing but inheritance from the colonial state that once

inhabited Indonesia. The difference is only in the administrative area where the systems and policies in use today are based on the needs desired by the authorities. The end of this research shows that Soppeng has a long series of history related to government dynamics. But the results of the system of government that was once implemented, eventually became the first door in the media of resistance, globalizing the masses in fighting the invaders and advancing and developing the region.

Keywords: *Government, Soppeng, Afdeling Bene and Andi Wana Government*

A. Pendahuluan

Nusantara yang awal mulanya mengalami zaman feodal mewariskan sistem pemerintahan kerajaan di Nusantara, di antara sekian pulau-pulau di Nusantara, Sulawesi Selatan menjadi salah satu pulau dengan banyak kerajaan yang mempunyai sistem pemerintahan di daerahnya masing masing. *Datu ri Soppeng, Addatuang di Sidenreng, Addatung di Sinjai, Mangkau ri Bone, Mappajunge ri Luwu, Karaeng (sombaya) ri Gowa* merupakan pemimpin pemerintahan di beberapa daerah di Sulawesi selatan. Sistem kerajaan inilah yang mengatur pemerintahan di berbagai wilayah. Dinamika politik yang terjadi telah lama terjadi sejak dimulainya peradaban di tanah Sulawesi terkhusus Suku Bugis-Makassar yang mendiami wilayah di Sulawesi Selatan. Konsep ini dapat dilihat dari fakta sejarah bahwa hampir semua kerajaan atau sistem pemerintahan di Bugis dan Makassar terbangun dari adanya perjanjian politik antara kelompok dalam wilayah pemukiman masing masing untuk mengangkat pemimpin atau raja mereka.

Soppeng sebagai salah satu kabupaten di bawah daerah administrasi Sulawesi Selatan dahulunya merupakan sebuah kerajaan kembar, *Soppeng Riaja* yang dipimpin oleh *Manurunge ri Sekkanyiliq* atau yang lebih dikenal sebagai *La Temmamala*, dan *Soppeng rilau* yang dipimpin oleh *Manurunge ri Gowarie*. Kedua kerajaan ini berpusat di Sewo dan Gattateng. Kedua kerajaan ini kemudian bersatu melalui perkawinan menjadi Kerajaan Soppeng yang dipimpin oleh *Tomanurung'e La Temmamala*. Melalui perkawinan yang

dijalankan oleh pihak Soppeng Riaja dan Soppeng Rilau ini cukup berhasil merekonstruksi tatanan politik dan pemerintahan Kedatuan Soppeng hingga sekarang. (AKW, 2016).

Pembagian administrasi wilayah pada masa pemerintahan Hindia Belanda dibagi dalam lingkungan kerja yang disebut wilayah (*gewest*), untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan umum. *Gewest* merupakan kesatuan geografis, tanpa perangkat sendiri dan tanpa keuangan sendiri, “jadi pemerintahan dilakukan secara *sentralistik ekstrim*. Jalurnya hanya dekonsentrasi dahulunya terdapat banyak wilayah kemudian dikurangi untuk menyesuaikan sistem pemerintahan”. (Surianingrat, 1981) Dalam tingkatan provinsi-provinsi dibagi dalam *afdeling*, yang kemudian masing-masing dikepalai oleh *residen*. Wewenang untuk mengambil keputusan yang sangat penting tetap ada pada gubernur. Residen sebagai kepala *afdeling* mempunyai tugas untuk memimpin dan mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah *afdeling*, terutama dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban. Dinas-dinas teknis tidak berada di bawah residen tetapi dinas dimaksud disusun menurut wilayah *afdeling*, maka kadang-kadang berhubungan dengan residen. Pemerintahan kabupaten selalu mendapat perhatian residen, “setiap *afdeling* terdiri dari 2-6 kabupaten. Pada umumnya kabupaten merupakan wilayah kerja seorang asisten residen. Dimana asisten residen bukanlah kepala wilayah tapi hanya sebagai pelengkap dan mempunyai tugas khusus di bidang

pertahanan dan polisi. Hubungannya dengan bupati adalah sangat penting. Bupati maupun asisten residen merupakan *adviseur* dari bupati, bukan berari atasan bupati. Asisten residen dan bupati wajib saling membantu. Kepala asisten residen dibantu oleh beberapa kontrolir, dan kadang-kadang kontrolir menjadi sekretaris *afdeling*, selain daripada itu terdapat *adspirant controlir* mereka adalah tenaga muda pada pemerintahan umum, yang sebenarnya sedang mengikuti pendidikan praktek.”(AKW, 2016) Daerah-daerah yang telah berhasil menjadi taklukan Belanda mendapat status *afdeling* sebagai bagian dari pemerintahan Belanda dan daerah-daerah yang lebih kecil mendapat status *Onderafdeling* sebagai cabang pemerintahan.

Selama *Onderafdeling* Soppeng berada di bawah naungan *Afdeling* Bone, pemerintahan di tiap keresidenan tetap dilaksanakan oleh adat masing masing *Onderafdeling*. Dimana raja yang berkuasa pada masa itu tetap menjalankan roda pemerintahannya. pelaksanaan sistem pemerintahan seperti ini terjadi pada tahun 1906-1942, hingga akhirnya pada tahun 1942 terjadi pemindahan kekuasaan ketika Jepang memasuki Indonesia.

Selama masa pendudukan Jepang, sistem pemerintahan tidak jauh berubah, hanya ada sedikit perubahan, dalam hal administrasi maupun struktur pemerintahannya. Pada masa pendudukan Jepang kesengsaraan rakyat Indonesia pada umumnya dan Soppeng pada khususnya semakin dirasakan, pemerintahan Jepang yang membutuhkan pasokan makanan maupun tenaga dalam menghadapi perang, membuat kehidupan rakyat semakin menderita. Hingga akhirnya terjadi pergolakan dan perlawanan rakyat di Sulawesi Selatan terkhusus di Soppeng yang pemuda-pemudanya menghimpun kekuatan dan membentuk organisasi perjuangan guna memperjuangkan kemerdekaan. Pada fase ini, hasrat akan merdeka dan jiwa nasionalisme semakin kental dirasakan. Gejolak perlawanan

semakin sering terjadi pasca pembentukan Negara Indonesia Timur yang digagas oleh Van Mok, dimana Belanda yang diboncengi tentara Sekutu mulai kembali ke Indonesia, hal ini tentu memantik perlawanan yang cukup panjang hingga dikenal sebagai fase revolusi dalam sejarah perjuangan Indonesia. Seiring perjalanan waktu akhirnya pada tahun 1957 Andi Wana diangkat menjadi kepala daerah berdasarkan pemilihan umum yang dilaksanakan di Soppeng. Kemudian Soppeng berubah menjadi daerah tingkat II berdasarkan Undang-Undang Darurat No 4 Tahun 1957. (Patunru, 2004)

Andi Wana merupakan datu pertama yang menjabat sebagai seorang kepala daerah sekaligus raja terakhir Kedatuan Soppeng. Fakta ini merupakan bagian yang menarik dari sebuah perjalanan politik di Soppeng, hal ini tentu menarik jika dapat mengulas bagaimana Andi Wana mengatur pemerintahan di dua fase yang berbeda. Dinamika pemerintahan yang dialami oleh Andi Wana dapat menjadi referensi tentang sistem pemerintahan daerah tingkat II di fase awal kemerdekaan, setelah lepas dari negara penjajah seperti Hindia Belanda dan Jepang serta pasca lepas dari Negara Indonesia Timur. Hal ini juga dapat menjadi pembandingan yang tepat antara sistem pemerintahan bercorak feodalistik dengan sistem pemerintahan setelah menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Metode ini sering digunakan dalam Ilmu Sejarah dan Ilmu Sosial lainnya dengan tujuan untuk menemukan suatu hal yang unik dan mampu mengungkapkan peristiwa yang telah terjadi di masa lampau (Priyadi, 2012) Metode ini juga merupakan metode penelitian sejarah yang bersifat deskriptif analitis, artinya penelitian ini berisi tentang penjelasan dari persoalan yang ada dalam penelitian ini secara naratif, kemudian dianalisis dan dicari hubungan kausalitasnya.

Penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara jelas mengenai dinamika pemerintahan di Soppeng.

1. Heuristik

Pengumpulan sumber atau dalam kajian sejarah lebih dikenal dengan heuristik. Heuristik merupakan proses pencarian atau pengumpulan sumber-sumber yang digunakan untuk merekonstruksi sejarah. Penentuan sumber sejarah akan mempengaruhi tempat (dimana) atau siapa (sumber informan lisan) dan cara memperolehnya. Sumber sejarah dibedakan atas sumber tulisan, lisan dan benda. Sumber sejarah primer yang tertulis dalam sejarah umumnya berupa dokumen (arsip). (Hamid, 2008)

Pada tahapan ini, pengumpulan sumber yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diangkat, pengumpulan data yang penulis lakukan lebih banyak pada pengumpulan sumber tertulis berupa sumber-sumber tertulis primer dan sekunder dikumpulkan. Sumber primer didapatkan dari Kantor Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, yaitu sumber dari Arsip Kabupaten Soppeng (1907-1960). Sumber-sumber tertulis sekunder didapatkan dari buku-buku tersebut dan kemudian dapat dijadikan rujukan atas penulisan ini. Sumber-sumber tertulis sekunder tersebut penulis peroleh dari Perpustakaan Sejarah FIS UNM, Perpustakaan Umum Universitas Negeri Makassar, Perpustakaan Universitas Hasanuddin, ruang baca Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, ruang baca Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, serta Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar.

2. Kritik

Jika sumber-sumber yang digunakan sudah dianggap cukup, langkah selanjutnya adalah menilai sumber tersebut untuk menyeleksi dan menguji kebenaran dan keabsahan suatu sumber, guna mendapatkan

data yang otentik. Dalam kritik sumber, terdapat penekanan tertentu yang bertujuan untuk memberikan definisi kritik sumber itu sendiri. Tujuan dari kegiatan-kegiatan ini adalah bahwa setelah sejarawan berhasil mengumpulkan sumber-sumber dalam penelitiannya, ia tidak akan menerima begitu saja apa yang tercantum dan tertulis pada sumber-sumber itu. Langkah selanjutnya ia harus menyaringnya secara kritis, terutama terhadap sumber-sumber pertama, agar terjaring fakta yang menjadi pilihannya. Langkah-langkah inilah yang disebut kritik sumber, baik terhadap bahan materi (ekstern) maupun terhadap substansi (isi) sumber. (Sjamsuddin, 2012) Pada kiritik intern yaitu kritik terhadap isi atau kandungan sumber, validitas sumber, melihat kesesuaian isi yang dijelaskan dalam sumber yang terkait. Penulis berusaha meyakinkan bahwa data yang diperoleh merupakan benar adanya, sehingga bisa dikatakan kritik intern ini juga menguji kredibilitas suatu sumber.

Kritik ekstern adalah langkah-langkah meneliti atau menguji apakah dokumen-dokumen atau sumber-sumber sejarah yang didapatkan otentik atau asli, utuh, atau sudah banyak mengalami perubahan, bahkan mungkin palsu. Kritik ekstern menegakkan fakta dari kesaksian seseorang, bahwa kesaksian itu benar-benar diberikan oleh orang tersebut dengan kesaksian yang telah diberikan itu berdasarkan fakta yang terjadi dan tidak mengalami perubahan.

3. Interpretasi

Tahap ini merupakan tahapan lanjutan. Sumber sejarah yang telah didapatkan sifatnya masih bisu. Oleh karena itu, perlu ditafsirkan oleh sejarawan atau peneliti. Berdasarkan hal ini, maka seorang peneliti akan menyusun fakta-fakta sejarah yang dapat dibuktikan kebenarannya. Sebelumnya

peneliti harus memahami sumber untuk dapat memberi penafsiran terhadap sumber yang telah diperoleh. Penulis pada tahap ini berupaya mencari kausalitas antar fakta dari sumber yang telah ditemukan sehingga dapat dirangkai menjadi suatu peristiwa sejarah.

4. Historiografi

Tahap ini merupakan tahapan terakhir dalam penulisan sejarah. Pada tahap ini penulis merangkai fakta yang telah ditafsirkan secara tertulis, dimana setelah melalui proses kritik sumber dan interpretasi data, sehingga menjadi sebuah cerita sejarah yang ditulis dengan memenuhi kaidah-kaidah penulisan sejarah.

C. Tinjauan Penelitian

Soppeng dahulunya merupakan sebuah kerajaan kembar sebelum terbentuk menjadi sebuah kerajaan, hingga seiring dinamika pemerintahan di Kerajaan Soppeng, terbentuk federasi yang dikenal dengan nama Tellumpoccoe. Kerajaan Soppeng beraliansi dengan Kerajaan Bone serta Kerajaan Wajo. Tiga kerajaan ini telah lama melakukan kerja sama baik dari sisi politik maupun ekonomi, pemegang kekuasaan tertinggi yang dipegang oleh masing-masing raja dari ketiga kerajaan ini yang menentukan segala hal dalam kebijakan pemerintahan di daerah kekuasaannya.

Soppeng yang merupakan kerajaan berdaulat pada akhirnya mengalami dinamika pemerintahan seiring dengan masuknya penjajahan Kolonial Hindia Belanda. Sebelum menguasai daerah Soppeng, Hindia Belanda terlebih dahulu melakukan penaklukan terhadap kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan. Pada tahun 1905, Belanda mengirim pasukannya ke Sulawesi untuk memaksa kerajaan-kerajaan menyerahkan kekuasaan sepenuhnya kepada pemerintah Hindia

Belanda. Dalam perkembangan selanjutnya, Pemerintah Belanda melakukan *expedite naa de Ziid Celebes* (ekspedisi ke Sulawesi Selatan) dan berhasil menaklukkan daerah-daerah yang ada di Sulawesi Selatan. Salah satu daerah yang ditakluki ialah Kerajaan Bone. Pasukan ekspedisi militer Belanda tiba di perairan Teluk Bone di depan Pelabuhan Bajoe dan mengirim ultimatum kepada Raja Bone ke-11 La Pawawoi Karaeng Sigeri, menuntut agar raja Bone memberikan hak pemerintah guna mengatur dan mengawasi pelabuhan. Namun, tuntutan yang diajukan oleh pemerintah Hindia Belanda mendapat penolakan mutlak dari pihak Kerajaan Bone, hingga akhirnya terjadilah pertempuran antara pasukan Bone melawan pasukan militer Belanda. (Nonci, 2003) Jatuhnya Kerajaan Bone membuat federasinya tidak mundur dalam melakukan perlawanan terhadap Hindia Belanda. Namun mengingat daerah Bone merupakan salah satu kerajaan yang memiliki wilayah dan angkatan perang yang cukup tangguh, tunduknya Kerajaan Bone pada Hindia Belanda dan dikuasainya Pelabuhan Bajoe, mempermudah Belanda dalam menaklukkan kerajaan-kerajaan yang lebih kecil. Secara geografis pelabuhan Bajoe merupakan tempat strategis dalam melakukan perdagangan maupun dalam hal titik awal perluasan wilayah. Banyak cara yang dilakukan oleh pihak Hindia Belanda dalam menaklukkan wilayah yang ada di Sulawesi Selatan, selain melakukan ekspedisi militer, pihak Hindia Belanda juga melakukan upaya melalui pendekatan diplomasi. (Nur, 2018)

Seperti yang diketahui, pemerintah Hindia Belanda mulai melibatkan penguasa setempat dalam menjalankan roda pemerintahan setelah perlawanan terhadap Belanda mulai gencar dilakukan. Pada tahun

1906, ketika pembatasan kekuasaan kepada datu dan dewan hadat yang berlangsung cukup lama. Tahun 1923, ketika A.J.L. Couvreur menjadi gubernur di Sulawesi, pemerintahan kerajaan cukup punya andil dalam menjalankan pemerintahan. Di tingkat pemerintahan pusat kerajaan, diadakan pembagian tugas antara anggota-anggota di dalam pemerintah kerajaan.

Setelah kedatangan Hindia Belanda di Kerajaan Soppeng dan campur tangannya terhadap pemerintahan di Kerajaan Soppeng, Soppeng yang telah menjadi bagian dari pada *Afdeling Bone* pada masa penjajahan Kolonial Belanda disebut *Onderafdeling* Soppeng-pun mengalami perubahan pada struktur pemerintahannya antara lain: 1) Controleur, 2) Juru Tulis, 3) Datu, 4) Sulle Datu 5) Arung Bila 6) Pa'bicara 7) Watang Lipu. (Lestari, 2008)

Struktur inilah yang digunakan Kerajaan Soppeng pada masa penjajahan Kolonial Belanda, dimana kontrolir merupakan pejabat pemerintahan Hindia Belanda yang bertugas dalam mengawasi jalannya pemerintahan di *Onderafdeling* Soppeng. Kontrolir merupakan pejabat pelaksana pemerintahan Belanda yang langsung berhubungan dengan pejabat pimpinan pemerintahan bumiputera dan mengawasi segala pelaksanaan pemerintah di wilayah kekuasaannya. Selain itu, ia juga mengatur pemungutan pajak menentukan kerja wajib, melakukan pengadilan, dan lainnya yang berhubungan dengan dengan pelaksanaan pemerintahan. (Poelinggomang, 2004)

D. Pembahasan

1. Soppeng pada Masa *Afdeling Bone*

Soppeng yang merupakan kerajaan berdaulat pada akhirnya mengalami dinamika pemerintahan seiring dengan masuknya penjajahan Kolonial Hindia

Belanda. Sebelum menguasai daerah Soppeng, Hindia Belanda terlebih dahulu melakukan penaklukan terhadap kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan. Pada tahun 1905, Belanda mengirim pasukannya ke Sulawesi untuk memaksa kerajaan-kerajaan menyerahkan kekuasaan sepenuhnya kepada pemerintah Hindia Belanda. Dalam perkembangan selanjutnya, Pemerintah Belanda melakukan *expedite naa de Ziud Celebes* (ekspedisi ke Sulawesi Selatan) dan berhasil menaklukkan daerah-daerah yang ada di Sulawesi Selatan. Pasukan ekspedisi militer Belanda tiba di perairan Teluk Bone di depan Pelabuhan Bajoe dan mengirim ultimatum kepada Raja Bone ke-11 La Pawawoi Karaeng Sigeri, menuntut agar raja Bone memberikan hak pemerintah guna mengatur dan mengawasi pelabuhan. Namun, tuntutan yang diajukan oleh pemerintah Hindia Belanda mendapat penolakan mutlak dari pihak Kerajaan Bone, hingga akhirnya terjadilah pertempuran antara pasukan Bone melawan pasukan militer Belanda (Nonci, 2003)

Tunduknya Kerajaan Bone pada Hindia Belanda dan dikuasainya Pelabuhan Bajoe, mempermudah Belanda dalam menaklukkan kerajaan-kerajaan yang lebih kecil. Secara geografis pelabuhan Bajoe merupakan tempat strategis dalam melakukan perdagangan maupun dalam hal titik awal perluasan wilayah. Banyak cara yang dilakukan oleh pihak Hindia Belanda dalam menaklukkan wilayah yang ada di Sulawesi Selatan, selain melakukan ekspedisi militer, pihak Hindia Belanda juga melakukan upaya melalui pendekatan diplomasi. (Nur, 2018)

Selepas kekalahan Bone dan terbentuknya *Afdeling Bone* yang membawahi 5 *Onderafdeling*, yaitu *OnderAfdeling Bone* Utara, *OnderAfdeling Bone* Tengah, *OnderAfdeling Bone* Selatan, *Onderafdeling* Wajo dan *Onderafdeling* Soppeng. Pada 25 November 1905, Panglima Ekspedisi Belanda van Loenen tiba di

Watansoppeng dan melakukan rapat dengan Datu Sitti Zaenab selaku datu di Kerajaan Soppeng. Rapat dilangsungkan di Istana Datu Soppeng itu membawa hasil yang memuaskan pihak Belanda, dimana Datu Soppeng berhasil dipaksa untuk menerima dan menandatangani sebuah "Perjanjian Pendek" atau lazim disebut "*Korte Verklaring*"

Van Loenen memaklumkan kepada datu Soppeng beserta pembesar-pembesarnya, adapun isi Perjanjian Pendek tersebut adalah

Pemerintah Kerajaan Soppeng harus membayar upeti perang sejumlah f75. 000.- kepada Gubernurmen Hindia Belanda. Rencana-rencana Gubernurmen Hindia Belanda tentang pemungutan pajak, pembuatan jalan raya, larangan pemakaian senjata tajam di tempat umum, dan pengumpulan senjata api.

Soppeng yang telah menjadi *Onderafdeling* di bawah naungan *Afdeling Bone*, tidak bisa terlalu banyak menentukan kebijakan pemerintahan sejak pemerintah Hindia Belanda menempatkan kontrolir dalam mengawasi *Onderafdeling* Soppeng. Campur tangan Hindia Belanda dalam urusan pemerintahan semakin jelas terlihat, meskipun pimpinan tertinggi pemerintahan tetap dipegang oleh datu Soppeng.

Pada tahun 1923 pada masa A.J.L. Couvreur menjadi Gubernur di Sulawesi Selatan, Pemerintah Kerajaan Soppeng mulai mendapat penghargaan yang lebih baik dari Pemerintah Hindia Belanda. Gubernurmen Hindia Belanda menata kembali kekuasaan dalam lingkungan Daerah Gubernur Celebes Selatan, raja dan kepala adat yang sejak tahun 1906 tidak terlalu dilibatkan dalam urusan politik pemerintahan, diberikan kesempatan untuk lebih banyak bertanggungjawab dan menjalankan pemerintahan atas nama Gubernurmen Hindia Belanda. Dari penataan kekuasaan ini, Bone, Soppeng, dan Wajo diberikan

kekuasaan *zelfbestuur* (Swapraja) yang membawahi beberapa distrik dan *onderdistrik*. (Patunru, 1964)

Khusus pada *Onderafdeling* Soppeng wilayahnya dibagi menjadi 7 distrik, yaitu:

- a. Distrik Lalabata
- b. Distrik Lilirilau
- c. Distrik Liliriaja
- d. Distrik Pattojo
- e. Distrik Citta
- f. Distrik Marioriwawo
- g. Distrik Marioriawa (Abidin, Arsip Regening Van Oost Indonesia)

Segala kebijakan yang diterapkan Hindia Belanda pada masa ini semata untuk menjaga stabilitas politik di daerah jajahannya. Terlepas dari beragam perlawanan yang terus ada menentang keberadaan Hindia Belanda.

2. Kondisi Pemerintahan di Soppeng pada Masa Pendudukan Jepang.

Politik terus mengalami dinamika seiring perjalanan waktu, baik dalam hal sistem maupun pemerintahan yang menjalankannya. Setelah wafatnya Datu Soppeng Sitti Zaenab pada tahun 1940 dan digantikan putranya Andi Wana sebagai pemimpin di Kerajaan Soppeng. Andi Wana menjabat sebagai datu selama setahun setelah terlantiknya hingga pada tahun 1942, Jepang mulai memasuki Indonesia dan melakukan invasi ke beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Dimulai pada tanggal 10 Januari 1942, Jepang menyerbu Indonesia. Pada akhir bulan Februari, bala tentara Jepang menghancurkan armada gabungan Belanda, Inggris, Australia, dan Amerika dalam pertempuran di Laut Jawa. Pada tanggal 8 Maret 1942, pihak Belanda di Jawa menyerah dan Gubernur Jendral Van Starckenborgh ditawan oleh pihak Jepang (Ricklefs, 1991). Maka berakhirlah kekuasaan Belanda dan digantikan oleh Jepang. Setelah Jepang menguasai Indonesia, beberapa kebijakan awal pemerintahannya pertama dimulai dari pembagian wilayah. Dalam hal ini Jepang membagi wilayah pemerintahan militernya menjadi tiga bagian,

yaitu wilayah Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku berada di bawah kekuasaan Angkatan Laut Jepang yang berkedudukan di Makassar. Wilayah Sumatra di bawah pemerintahan Angkatan Darat Jepang berkedudukan di Bukit Tinggi. Wilayah Jawa-Madura berada di bawah kekuasaan Angkatan Darat Jepang berkedudukan di Jakarta (Ricklefs, 1991)

Kedatangan Jepang pada mulanya disambut baik oleh beberapa raja terkemuka dan rakyat karena Jepang dianggap telah membebaskan mereka dari penjajahan Belanda dan telah mempropagandakan bahwa mereka adalah saudara tua yang akan melindungi saudaranya dari penindasan kulit putih (Ricklefs, 1991) Pada tanggal 9 Februari 1942, tentara Jepang mendarat di Pantai Barombong-Makassar. (Nur, 2007) Pasukan Jepang dengan cepat melawan dan mengalahkan pasukan Belanda hingga akhirnya dapat menguasai seluruh wilayah yang ada di Sulawesi Selatan, termasuk Soppeng.

Masa pendudukan Jepang kurang lebih selama 4 tahun, telah memberikan banyak kesempatan kepada orang Bugis-Makassar untuk menduduki berbagai jabatan pemerintahan dan perusahaan umum di daerah-daerah dan menjadi pengalaman yang berguna dalam menyusun administrasi pemerintahan dan perusahaan (Mattulada, 2015) Hal ini menjadi sebuah pelajaran dan pengalaman bagi masyarakat dikarenakan telah memiliki pengalaman sebagai staf administrasi untuk diterapkan dalam membangun daerah.

Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Dengan menyerahnya Jepang, maka digunakan oleh Belanda untuk kembali menjajah bangsa Indonesia. Hal ini membawa angin segar terhadap rakyat Indonesia tidak terkecuali rakyat di Soppeng. Namun pada akhirnya, harus kembali menghadapi Belanda yang masuk di

Indonesia dan menghadapi perang kemerdekaan yang revolusioner.

3. Kondisi Pemerintahan Soppeng Masa Negara Indonesia Timur

Setelah peristiwa Rengasdengklok, akhirnya Proklamasi kemerdekaan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Berita resmi ini proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dan lahirnya Negara Republik Indonesia diketahui penduduk Kota Makassar melalui surat kabat harian *Pewartu Celebes* pada tanggal 29 Agustus 1945. Pemberitaan mengenai kemerdekaan segera diteruskan ke pedalaman-pedalaman di seluruh Sulawesi Selatan. Penyebarluasan berita tentang proklamasi berlangsung dengan sangat cepat dan berbagai cara, antara lain melalui pemberitaan yang disebar dari mulut ke mulut, melalui siaran radio dan selebihnya dapat mendengar berita proklamasi kemerdekaan dari penyampaian aparat pemerintahan RI yang baru terbentuk di Sulawesi Selatan. Berita mengenai Proklamasi Kemerdekaan telah mencapai seluruh Sulawesi Selatan pada pertengahan bulan September 1945. Berita Proklamasi Kemerdekaan menjadi euforia tersendiri bagi seluruh rakyat karena penjajahan masih melekat di benak rakyat. Pengalaman pahit yang tidak ingin diulang sehingga kemerdekaan bangsa Indonesia dari bangsa asing harus diperjuangkan dan terus dipertahankan. (Sarita, 1938)

Di soppeng, berita kemerdekaan mulai dibicarakan secara berbisik sejak tanggal 22 Agustus 1945. Kemudian, setelah organisasi PNI (Pemuda Nasional Indonesia) terbentuk atas inisiatif Andi Mahmud, berita kemerdekaan tersebar luas. Andi Mahmud yang memiliki pesawat penerima radio, sempat mendengar adanya proklamasi. Ketika itu, ia menjabat sebagai Kepala Distrik Liliraja, Onderafdeling Soppeng. (Abidin, Arsip Regening Van Oost Indonesia)

Pendudukan sekutu di Indonesia Timur, ditandai dengan pendaratan-pendaratan

tentara Australia antara lain, di Kupang, 11 September 1945, Makassar, 21 September 1945, Ambon, 22 September 1945, dan Manado, 2 Oktober 1945. Semula dipimpin oleh Brigadier Jendral Dougherty, kemudian digantikan oleh Brigadier Jendral F.O Chilton. Pada bulan Maret 1946 di Bali diduduki tentara Inggris di bawah pimpinan Mayor Jendral Mansergh. Tentara Australia di wilayah Indonesia Timur menempatkan markas besarnya di Pulau Morotai. Di samping itu, Belanda menempatkan seorang *Chief Commanding Netherlands Indie Civil Administration* (CONICA). *Chief* ini membawahi seluruh aparat *Netherlands Indies Civil Administration* (NICA) di Indonesia Timur dan menjadi pendamping Panglima Tertinggi Tentara Australia. (Abidin, Arsip Regening Van Oost Indonesia)

Kebijakan pimpinan Australia menunjukkan bahwa aparat NICA yang turut bersamanya ditempatkan sebagai bagian organisasi sekutu. Perluasan pendudukan tentara Australia dibarengi dengan penempatan pejabat-pejabat pemerintahan NICA dan KNIL pada daerah-daerah yang didudukinya. Keadaan ini secara politis menguntungkan Belanda, seperti di Sulawesi. Gubernur pertama Provinsi Sulawesi RI, Dr. G.S.S.J Ratulangi yang berkedudukan di Makassar, tidak diberi kesempatan melaksanakan pemerintahan dan pemerintah Belanda menempatkan Dr. Lion Cachet sebagai Residen Selebes Selatan. Tanggal 5 April 1946, Dr. G.S.S.J Ratulangi dan beberapa tokoh republik di Makassar ditangkap, kemudian dibuang ke Serui, Irian Barat. Akibatnya aparat pemerintahan di Provinsi Sulawesi tidak berfungsi, untuk mengatasinya Pemerintah Provinsi Sulawesi terpaksa dialihkan pelaksanaannya ke Komisariat Sulawesi di Jogjakarta. (Abidin, Arsip Regening Van Oost Indonesia) Hal ini tentu menyebabkan tokoh-tokoh pemuda menjadi marah atas tindakan tersebut, para

pemuda beranggapan bahwa penguasa baru ini telah menghina Pemerintah Republik Indonesia.

Keadaan berikutnya cukup berdampak terhadap situasi politik dan sistem ketatanegaraan berikutnya khususnya di wilayah Indonesia Timur. Namun, tidak berarti bahwa Belanda (NICA) sudah berhasil, karena perjuangan kemerdekaan terus berlangsung. Ketidakmampuan Belanda memaksakan kehendaknya untuk mengembalikan kekuasaannya sebagaimana Hindia Belanda dulu, maka diusahakanya memecah belah wilayah Indonesia dalam bentuk pemerintahan federal (negara-negara bagian) yang terikat dengan Kerajaan Belanda. Konseptor utama sistem federasi Indonesia tersebut adalah Letnan Gubernur Jenderal Dr. H.J. van Mook, penguasa penuh eksekutif pemerintahan Hindia Belanda. Untuk mewujudkannya, Belanda semakin meningkatkan tekanan-tekanan politik dan militernya terhadap Indonesia. Konferensi Denpasar yang diselenggarakan pada tanggal 24 Desember 1946 telah melahirkan Negara Indonesia Timur (NIT) yang tentunya struktur pemerintahannya berdasarkan pada unsur-unsur pemerintahan kolonial dengan ibu kotanya Makassar.

Di daerah Soppeng juga dibentuk organisasi kelaskaran yang didirikan pada tanggal 27 Oktober 1945 yang diberi nama Gabungan Pemuda Indonesia Soppeng (GAPIS). Organisasi kelaskaran ini diprakarsai oleh pemuda-pemuda Soppeng, diantaranya Abdul Azis, M. Idris, M Arsyad Tamin, M. Nur, dan Andi Maddiheng. Kemudian pemuda-pemuda ini bertemu dan berunding untuk mencetuskan ide, yaitu pembentukan badan perjuangan. Organisasi perjuangan ini adalah wadah perjuangan yang siap menghimpun potensi pemuda-pemuda pejuang kemerdekaan yang telah berikrar untuk berjuang dan membela serta mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dari tangan penjajah. Para pejuang

yang tergabung dalam organisasi ini, menyusun barisan dengan semangat yang tinggi menghadapi kedatangan Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia. Seperti yang dikemukakan sebelumnya laskar-laskar ini terbentuk sebagai bentuk respon dari kedatangan Belanda untuk mempertahankan kemerdekaan. Hal ini membuktikan bahwa hasrat kemerdekaan dan rasa nasionalisme dari pemuda-pemuda yang tergabung dalam laskar ini telah terpupuk dengan baik, usaha dalam mempertahankan kemerdekaan jelas dilakukan dalam bentuk wadah organisasi perjuangan.

Seiring pergolakan perlawanan laskar-laskar yang ada di Indonesia, maupun Sulawesi terkhusus di Soppeng, mempertahankan kemerdekaan terus dilakukan menuntut pembubaran NIT serta menuntut terbentuknya Negara Republik Indonesia. Hasrat untuk merdeka sepenuhnya membuat para tokoh pemuda dan masyarakat terus gencar melakukan perlawanan baik melakukan serangan fisik maupun dengan jalur diplomasi. Hal tersebut akhirnya menarik perhatian dunia, melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa perundingan dilakukan antara Belanda dan Indonesia guna menyelesaikan masalah pertikaian Indonesia dan Belanda. Penyerahan dan pengakuan kedaulatan dilakukan pada tanggal 27 Desember 1949, meskipun kenyataannya kedaulatan sudah diakui, perjuangan untuk kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia masih terus dilakukan. Pada tanggal 15 Agustus 1950 di hadapan sidang DPRS dan Senat RIS di Jakarta. Ir. Soekarno mengumumkan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Nur, 2007) Semua struktur konstitusional semasa tahun tahun revolusi secara resmi dihapuskan. Republik Indonesia Serikat dengan Republik Indonesia sebagai unsur di dalamnya, serta negara-negara federal lainnya dinyatakan berakhir dan digantikan oleh suatu Republik Indonesia yang baru.

4. Proses Pembentukan Daerah Tingkat II Soppeng

Sulawesi Selatan merupakan bagian dari pemerintahan Sulawesi, sebelum terbentuknya negara kesatuan RI, menurut Undang-Undang Pokok Pemerintahan NIT No. 44 tahun 1950 tertanggal 15 Juni 1950 merupakan suatu “Daerah Otonom Sulawesi Selatan” dengan pelaksanaan pemerintahannya dilakukan oleh DPRD dan Dewan Pemerintah. (Asrip Van Regering Van Oost Indoneise, 1964-1950)

Setelah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, pelaksanaan pemerintah dilaksanakan oleh Gubernur Sulawesi. Hal ini didasarkan pada peraturan pemerintah daerah Sulawesi Selatan untuk sementara waktu, melaksanakan persiapan pembubaran daerah Sulawesi Selatan dan pembagian Wilayahnya. (Lembaran Negara RI, 1950) Dalam mewujudkan pemerintahan daerah Sulawesi Selatan, gubernur ditugaskan untuk menyiapkan pembubaran dan pembagian daerah Sulawesi Selatan dalam daerah otonom tingkat II dengan bantuan suatu penasehat politik yang beranggotakan sebanyak banyaknya 10 orang. Penugasan ini berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tanggal 22 Desember 1951 No. do 1/14/4. (Arsip, n.d.) Pada tahun 1951 Gubernur I Sulawesi Sudiro, juga mengeluarkan Keputusan Gubernur No. 618 Tahun 1951 tentang diubahnya status *onderafdeling* menjadi kewedanan yang terdiri dari beberapa distrik.

Kondisi keamanan yang tidak stabil ini bisa dikatakan dilakukan oleh pasukan DI/TII pimpinan Kahar Muzakkar yang pasukannya di Soppeng dikomandoi oleh Bahar Mattaliu. Kondisi yang ditimbulkan ini meresahkan masyarakat dikarenakan penjarahan dan pembakaran rumah rumah warga yang membuat masyarakat merasa tidak aman atas terror-terror yang terus terjadi. Pasukan DI/TII ini di sebut Gerombolan atau *Gurilla* di Soppeng. Berdasarkan

laporan Kepala Wanua Marioriwawo pada tanggal 17 November 1952, bahwa ada beberapa kepala kampung yang bergabung dengan gerombolan tersebut.

Dengan bantuan para kepala kampung, Bahar Mattaliu melakukan penculikan, pembakaran dan perampokan di Wanua Marioriwawo. Para kelompok gerombolan ini bahkan menyiksa dan membunuh masyarakat yang dicurigai mata-mata, sedangkan warga yang mereka culik dijadikan tentara DI/TII atau anggota gerombolan. Kelakuan para gerombolan ini sangat meresahkan masyarakat, seperti yang terjadi di Kampung Laguliling dan Kampung Madello pada tanggal 16 Juni 1952, dimana terjadi perampokan dan pembunuhan yang dilakukan oleh gerombolan di bawah pimpinan Abdul Karim dari Lajjoa

Pemerintah Indonesia berusaha meredam gerakan yang mengancam kemerdekaan Indonesia dengan melakukan perubahan pada sistem pemerintahan. Pada tanggal 12 Agustus Tahun 1952, pemerintah mengeluarkan peraturan No. 34 Tahun 1952 tentang Pembubaran Wilayah Dalam Daerah Swatantra yang terdiri atas tujuh daerah swatantra yaitu:

- a. Daerah Swatantra Tingkat II Makassar: wilayah pemerintahannya meliputi daerah Gowa, Takalar, Jeneponto, Maros, dan Pangkajene Kepulauan dengan pusat pemerintahannya di Makassar
- b. Daerah Swatantra Tingkat II Bone: wilayah pemerintahannya meliputi daerah Bone, Soppeng, Wajo dengan pusat pemerintahannya di Bone
- c. Daerah Swatantra Tingkat II Pare-Pare: wilayah pemerintahannya meliputi Pare-Pare, Barru, Sidenreng, Rappang, Pinrang dan Enrekang dengan pusat pemerintahannya di Pare-Pare
- d. Daerah Swatantra Tingkat II Mandar: wilayah pemerintahannya meliputi Majene, Polman, Mamuju, dengan pusat pemerintahannya di Majene

- e. Daerah Swatantra Tingkat II Luwu dengan pusat pemerintahannya di daerah Luwu
- f. Daerah Swatantra Tingkat II Tana Toraja dengan pusat pemerintahannya di Tana Toraja
- g. Daerah Swatantra Tingkat II Sulawesi Tenggara: wilayah pemerintahannya meliputi Propinsi Sulawesi Tenggara sekarang. (DEPDAGRI, 1992)

Daerah Swatantra Bone yang meliputi Swapraja Bone, Soppeng, dan Wajo terdiri dari tiga badan pemerintahan sebagai berikut:

- a. DPR yang terdiri dari 35 orang, yaitu 15 dari Swapraja Bone, 19 dari swapraja Wajo, dan 8 dari Swapraja Soppeng.
- b. Kepala Daerah
- c. Dewan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari 5 anggota termasuk kepala daerah dan selaku anggota. (Patunru, 1964)

Setelah tiga tahun lamanya rakyat Soppeng memperjuangkan tuntutannya, maka pada tahun 1957 pemerintah mengabdikan tuntutan tersebut dengan dikeluarkannya Undang-Undang Darurat No 4 Tahun 1957 tentang Pembubaran Daerah Swatantra Bone, Wajo dan Soppeng. (Arsip, 1950) Dikabulkannya tuntutan tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa ketiga daerah tersebut mampu untuk menjadi daerah otonom dengan pertimbangan bahwa daerah tersebut mempunyai kondisi geografis yang sangat subur dan jumlah penduduk yang cukup besar sehingga dianggap telah mampu membangun daerahnya sendiri. (Arsip, 1950)

Pada tanggal 13 Maret 1957, daerah Soppeng akhirnya melepas diri dari daerah Swatantra Bone menjadi daerah otonom Tingkat II Kabupaten Soppeng sekaligus pelantikan kepala daerah yang pertama yaitu Datu Haji Andi Wana dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. P.7/2/24 Tanggal 8 Februari 1957. Dengan demikian berakhirlah untuk selama-lamanya pemerintah Swapraja Soppeng baik secara *de*

facto maupun secara *de jure*, dan dari tanggal pelantikan Andi Wana sebagai Kepala Daerah Soppeng inilah yang kemudian dianggap sebagai “Hari Lahir” Kabupaten Soppeng yang selalu diperingati setiap tahunnya hingga tahun 2000.

Pengangkatan Haji Andi Wana sebagai Kepala Daerah Soppeng tentunya sudah tidak diukur lagi dari status darah kebangsawannya, tetapi dilihat dari usaha yang telah dirintisnya selama ia menjabat sebagai datu. Di samping itu, Haji Andi Wana dianggap sangat berpengalaman dalam bidang pemerintahan. Sebelum terbentuknya Soppeng sebagai daerah kabupaten. Gubernur Sulawesi Lanto Daeng Pasewang meramalkan apabila tuntutan daerah Soppeng dikabulkan oleh pemerintah Republik Indonesia, maka kemungkinan besar Haji Andi Wana akan dipilih oleh DPR yang akan datang untuk menduduki jabatan sebagai kepala daerah Soppeng dengan berdasarkan pada kenyataan, bahwa ia mempunyai pengaruh dan mendapat simpati dari rakyat Soppeng serta mempunyai pribadi yang tinggi (Arsip, 1950). Ramalan Lanto Daeng Pasewang ternyata menjadi kenyataan. Berdasarkan pada kenyataan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa penunjukkan dan pengangkatan H. Andi Wana sebagai seorang pemimpin tidak lagi berdasarkan pada otoritas tradisional yaitu jabatan yang diwariskan secara turun-temurun seperti ketika diangkat sebagai datu Soppeng. Akan tetapi berdasarkan otoritas kharismatik, yaitu jabatan yang didasarkan pada otoritas legal rasional berdasarkan atas jabatan dan kemampuannya.

Krisis kemanan yang terjadi di Soppeng tidak serta-merta membuat perayaan-perayaan hari nasional, bahkan perayaan hari nasional tersebut dapat dilaksanakan dengan aman seperti pada hari Ibu pada tanggal 22 Desember 1955 di Kota Watan Soppeng dengan sederhana. Umat Kristen dapat merayakan hari Natal pada tanggal 25

Desember 1955 yang dihadiri oleh komandan Batalyon, Kepala Pemerintah Negeri Soppeng, Kepala Polisi, dan pejabat-pejabat lainnya. (Arsip, 1950)

5. Kebijakan Politik Andi Wana Pasca Terbentuknya Daerah Tingkat II

Pembentukan Daerah Tingkat II Soppeng merupakan langkah Awal dalam membenahi Soppeng menuju arah yang lebih baik. Peranan Andi Wana selaku Datu pertama yang menjadi kepala di daerah Soppeng cukup menunjukkan peranan yang sangat menonjol, seperti yang penulis katakan sebelumnya Soppeng sedari dulu telah memiliki kas yang cukup, hal itu tak terlepas dari pada sistem perekonomian yang dilakukan pada masa perkembangan Daerah Tingkat II Soppeng.

Salah satu sumber pendapatan daerah Soppeng sejak zaman penjajahan adalah pajak hasil bumi yang dikenakan pada para penggarap tanah, utamanya pajak hasil bumi yang dikenakan pada penggarap tanah, pajak kekakayaan, pajak benda, dan pajak pendapatan. Pajak-pajak inilah yang menunjang kegiatan perekonomian di daerah Soppeng adalah sebagai berikut:

- a. Pajak peralihan/pajak jalan/pajak tanah sebanyak Rp. 1.230.000.
- b. Retribusi (uang pasar/bea/potong hewan sebanyak Rp. 346.500.

Dari jumlah hasil pajak tersebut cukup menggambarkan bahwa daerah tersebut dapat mendapatkan hasil lebih dari kebutuhannya. Apalagi pada masa setelah terbentuknya Soppeng sebagai daerah otonom, tentunya pemerintah daerah akan berusaha seluas-luasnya untuk membangun dan memaksimalkan potensi daerahnya. Ini bukan berarti Soppeng tidak membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat, tetapi sekedar menggambarkan bahwa daerah Soppeng dengan keadaan daerah serta jumlah penduduknya yang cukup, dapat diharapkan untuk memenuhi keinginan pemerintah dikemudian hari (Arsip, 1950).

Soppeng yang terkenal sebagai salah satu daerah lumbung padi di Sulawesi Selatan menjadi penanda bahwa dalam hal pangan Soppeng lebih dari cukup dalam melingkupi kebutuhan pasokan makanan rakyat Soppeng. letak geografis yang menguntungkan juga menjadi faktor Soppeng sebagai daerah agraris yang mumpuni hal ini yang dimaksimalkan oleh pemerintahan di Soppeng dalam pemungutan pajak guna menambah kas keuangan pemerintah untuk membangun Soppeng. Hasil-hasil perkebunan dan pertanian juga memberikan pemasukan yang lebih kepada pemerintah Soppeng.

Memasuki tahun 1959, DPR Soppeng yang diketuai oleh Ambo Dalle dibekukan oleh pemerintah pusat untuk segera melaksanakan struktur pemerintahan yang disesuaikan dengan kondisi politik terkini. Andi Wana memasuki masa pensiun, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, dan digantikan oleh Wedana Andi Mahmud. Beliau dibantu oleh empat orang anggota Badan Pemerintah Harian (BPH), yaitu Andi Nuridin, Ahmad Said, H, Andi Galib, dan H. Djafar Zain. Disamping itu, dibentuk sebuah Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, yang beranggotakan 19 orang yang diketuai oleh M.S Muchtar, BA. (Nonci, 2003) Pada fase ini, dimulainya beberapa perubahan administrasi yang membuat kebijakan baru pasca berakhirnya masa jabatan Andi Wana, dimana secara administrasi setelah setahun berakhir masa jabatannya, ketujuh persekutuan adat yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya diubah menjadi lima buah Kecamatan yang bersifat administrasi di Soppeng, yakni:

- a. Kecamatan Marioriwawo ibu kotanya Takkalala
- b. Kecamatan Lilirilau ibu kotanya Cabbenge
- c. Kecamatan Liliriaja, Ibu kotanya Cangadi

d. Kecamatan Lalabata ibu kotanya Watan Soppeng

e. Kecamatan Marioriawa ibu kotanya Batu-Batu

Adapun Pattojo dan Citta dimasukkan pada Kecamatan Liliriaja, pembentukan desa-desa gaya baru juga giat dilaksanakan.

Andi Wana meninggal pada tanggal 6 Oktober 1960, hasil dari jasa yang telah dibangunnya kini telah hidup dan tumbuh di hati masyarakat Soppeng, untuk mengenang jasa-jasanya. Namanya telah diabadikan sebagai nama sebuah stadion di Laburawung Kabupaten Soppeng. Sampai kini Andi Wana bisa terus dikenang bukan hanya sebatas nama stadion, namun dalam sejarah daerah Soppeng, H. Andi Wana akan terus diingat sebagai seorang datu yang pernah memerintah di Kerajaan Soppeng, dan sebagai Kepala Daerah Soppeng yang pertama. Ia memerintah selama 19 tahun lamanya terhitung sejak tahun 1941-1960. Pengaruh H. Andi Wana dalam sejarah perjuangan maupun pembentukan daerah Soppeng akan menjadi sebuah pembelajaran bagi masyarakat terkhusus Kabupaten Soppeng. Kepemimpinan Andi Wana sebagai peletak tonggak dasar dan pemimpin Daerah Tingkat II Soppeng tidak terlepas dari dukungan masyarakat yang senantiasa berjuang bersama dan memacu pembangunan daerah Soppeng. Sama halnya cerita historis yang memiliki benang panjang, penghubung antara masa lalu dan kini, karena usaha pembentukan Daerah Tingkat II Soppeng hingga kini tak terlepas dari peranan masyarakat Soppeng, Hingga saat ini Soppeng tidak sepi prestasi dan terus mengalami perubahan-perubahan berarti dalam perkembangannya.

E. Kesimpulan

Melihat rentetan peristiwa historis yang terjadi di soppeng, jelas tergambar bahwa pemerintahan akan mengalami dinamika tersendiri, berdasarkan uraian

permasalahan dan pembahasan yang telah dikemukakan pada halaman-halaman sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat dikemukakan bahwa pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintah Kolonial Belanda yang di sesuaikan dengan politik penjajah. Pemerintah diawasi oleh kontrolir Belanda yang bertanggung jawab kepada asisten residen yang berada pada tingkat *Afdeling* dan kontrolir di tingkat *Onderafdeling*, sehingga sering terjadi dualisme kepemimpinan. Meski demikian pemimpin di Soppeng tetap memiliki kekuasaan terhadap wilayahnya walaupun terbatas. Kontrolir di *Onderafdeling* Soppeng bukan hanya pejabat pemerintahan Hindia Belanda yang bertugas dalam mengawasi jalannya pemerintahan di *Onderafdeling* Soppeng, selain itu, juga menguasai kas onderafdeling, memimpin pasukan polisi, melakukan pengaturan pemungutan pajak, menentukan kerja wajib, melakukan pengadilan, dan lainnya

Pada tahun 1945, Jepang yang menyerah tanpa syarat kepada tentara Sekutu. Kekalahan Jepang ini tentu dipergunakan sebaik baiknya oleh bangsa Indonesia untuk memproklamkan kemerdekaannya. Akan tetapi sejak di proklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia, semerta-merta bangsa Indonesia telah sepenuhnya merdeka. Belanda kembali ke indonesia memboncengi tentara Belanda, tujuan masuknya Belanda tidak lain untuk kembali menguasai Indonesia. Hal ini tentu menjadi sebuah pemicu bagi masyarakat indonesia untuk melakukan perlawanan terhadap belanda, ini yang menjadi tonggak awal sejarah Kelaskaran yang ada indonesia pada umumnya di Sulawesi Selatan khususnya. Banyak kelaskaran di Sulawesi Selatan yang melakukan perlawanan terhadap Belanda, Salah satunya adalah GAPIS yang merupakan Organisasi perlawanan yang berasal dari Soppeng.

Peranan Andi Wana dalam menjalankan pemerintahan di Soppeng, sangat beragam dan menyentuh banyak aspek di Soppeng, pemebntukan DPRD Soppeng dan terbentuknya Daerah Tingkat II Soppeng terjadi pada masa pemerintahan Andi Wana tahun 1957. Andi Wana menjadikan Soppeng sebagai salah satu daerah yang bukan hanya sebagai daerah yang subur dan maju dalam hal ketersediaan pangan dan perkembangannya daerah, selain sebagai salah satu daerah yang memiliki basis pejuang yang cukup diperhitungkan. Andi Wana selain memajukan perekonomian Soppeng, beliau juga turut memperhatikan dan mengembangkan berbagai bidang, seperti Bidang Pendidikan, Pertanian, Agama, Kebudayaan dan lain-lain. Hal inilah yang membuat Andi Wana menjadi salah satu pemimpin yang dikenang dalam sejarah Soppeng.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z., Arsip Regening Van Oost Indonesia. 2003. Ujung Pandang: Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provpnsi Sulawesi Selatan.
- AKW, H. B., 2016. *Lembah Walanae*. Yogyakarta: Ombak.
- Anon., n.d. *Arsip Dinas Kearsipan dan Kepustakaan Provinsu Sulawesi Selatan*. Sulawesi Selatan: s.n.
- Arsip, 1950. *Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinis Sulawesi Selatan Koleksi Arsip Pemerintahan Sulawesi Selatan. (1950-1960)*. Ujung Pandang: s.n.
- Arsip, 1950. *Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinis Sulawesi Selatan Koleksi Arsip Pemerintahan Sulawesi Selatan. (1950-1960) No Reg 209..* s.l.:s.n.
- Arsip, 1950. *Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinis Sulawesi Selatan Koleksi Arsip Pemerintahan Sulawesi*

- Selatan. (1950-1960) No Reg 282. s.l.:s.n.*
- Arsip, n.d. *Dengan berubahnya status daerah Soppeng sebagai daerah kabupaten dan diangkatnya Haji Andi Wana sebagai kepala daerah, maka dimulailah kegiatan penataan dan pembenahan administrasi pemerintahan daerah. Struktur organisasi pemerintah semasa Soppeng berstat. s.l.:s.n.*
- Arsip, n.d. *Dengan berubahnya status daerah Soppeng sebagai daerah kabupaten dan diangkatnya Haji Andi Wana sebagai kepala daerah, maka dimulailah kegiatan penataan dan pembenahan administrasi pemerintahan daerah. Struktur organisasi pemerintah semasa Soppeng berstat. s.l.:s.n.*
- Asrip Van Regering Van Oost Indoneise, 1964-1950. *Pemerintah Negara Timur. s.l.:s.n.*
- Badan Arsip, n.d. *Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provisi Sulawesi Selatan Koleksi Arsip Pemerintahan Sulawesi Selatan. Laporan Dari Acting Kepala Wanua Marioriwawo No Reg 1114. s.l.:s.n.*
- DEPDAGRI, 1992. *Sejarah Perkembangan Pemerintahan di Suawesi Selatan. Ujung Pandang: DEPDAGRI Provinsi Sulawesi Selatan.*
- Hamid, A. R., 2008. *Pengantar Ilmu Sejarah. Makassar: Rayhan Intermedia.*
- Lembaran Negara RI, 1950. *Lembaran Negara RI Nomor 28. s.l.:s.n.*
- Lestari, R. E., 2008. *Dualisme Pemerintahan Kerajaan Soppeng Pada Masa Penjajahan Kolonial Belanda. Makassar: Universitas Negeri Makassar.*
- Mattulada, 2015. *Latoa: Suatu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis.. Jakarta: Ombak.*
- N., 2003. *Sejarah Soppeng Zaman Prasejarah Sampapi Kemerdekaan. Makassar: CV. Aksara.*
- Nur, M. R., 20007. *Rafiuddin. Makassar: Rumah Ide.*
- Nur, R. M., 2018. *Lontara na Soppeng Dari Kerajaan Kembar Menuju Kabupaten. Makassar: Pustaka Refleksi.*
- Patunru, A. D., 2004. *Bingkisan Patunru Sejarah Lokal Sulawesi Selatan. Makassar: Lephass.*
- Patunru, D. A., 1964. *Sejarah Wajo Makassar. Makassar: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan.*
- Poelinggomang, L. E., 2004. *Perubahan Politik dan Hubungan Kekuasaan Makassar 1906-1942. Jakarta: Ombak.*
- Priyadi, S., 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Sejava. Yogyakarta: Ombak.*
- Ricklefs, M., 1991. *Sejarah Indonesia Modern. Yogyakarta: Gajah Mada Universiti Press.*
- Sarita, P., 1938. *Sejarah Perjuangan Angkatan 45 di Sulawesi Selatan. Ujung Pandang: PT. Gita Karya .*
- Sjamsuddin, H., 2012. *Metodologi Sejarah. Yogyakarta: Ombak.*
- Surianingrat, B., 1981. *Sejarah Pemerintahan di Indonesia Babak Hindia Belanda dan Jepang. Jakarta: Dewaruri Press.*

